



SUBYEK																															
KORAN/MAJALAH	KOMPAS	POS KOTA	MAJALAH :																												
	SEPUTAR INDONESIA	RAKYAT MERDEKA	GATRA																												
	KORAN TEMPO	REPUBLIKA	TEMPO																												
	✓ INVESTOR DAILY	MEDIA INDONESIA	INVESTOR INDONESIA																												
	BISNIS INDONESIA	SUARA PEMBARUAN	WARTA EKONOMI																												
	KONTAN	NERACA																													
HALAMAN	6																														
TANGGAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BULAN	JAN		PEB	MAR		APR				MEI		JUN	JUL					AGT		SEP		OKT		NOP		DES					

2013

Revisi PP Jalan Tol Hampir Rampung

JAKARTA – Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol, dipastikan hampir rampung. Salah satu klausul revisi peraturan tersebut adalah memasukkan kebijakan penunjukan oleh pemerintah terhadap badan usaha milik negara untuk membangun jalan tol.

“Revisi PP ini sudah hampir final. Sekarang sudah ada di Sekretariat Kabinet (Setkab). Kami tinggal diundang sekali lagi oleh Setkab sebelum diparaf oleh Presiden,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta, akhir pekan lalu.

Setelah perubahan PP itu rampung, lanjut dia, pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang berisi penunjukan langsung terhadap salah satu badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengerjakan proyek jalan bebas hambatan.

Selama ini, pengerjaan jalan tol lebih banyak dikerjakan oleh PT Jasa Marga. Namun, perusahaan ini tidak bisa mengerjakan proyek-proyek infrastruktur, khususnya jalan tol jika diberi penugasan dari pemerintah. Hal itu disebabkan perlu pendapat dari seluruh pemegang saham BUMN ter-

sebut yang telah tercatat dalam pasar modal.

“Jadi, di satu sisi peraturan pemerintah ini diperbaiki. Sedangkan pembenahan peraturan lain tentang konsep penunjukan langsung BUMN jalan tol ini juga sedang berjalan,” papar Djoko.

Dia berharap perubahan peraturan pemerintah dan peraturan presiden mengenai penunjukan langsung tersebut diharapkan dapat dikeluarkan pada tahun ini. Dengan demikian, pemerintah bisa segera mengerjakan proyek jalan tol yang dinilai kurang layak secara finansial, tetapi layak secara ekonomi.

“Sejauh ini BUMN yang diusulkan adalah PT Hutama Karya. Jadi, penunjukkan Hutama Karya sebagai BUMN jalan tol ini bersamaan dengan diterbitkannya PP tersebut,” ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Ari Widiyantoro mengungkapkan masih menunggu tiga instrumen hukum yang dibutuhkan yakni perubahan PP No 15/2005, serta dua perpres yakni tentang penunjukan dan Penambahan Modal Negara (PMN).

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan mengusulkan Hutama Karya bertransformasi menjadi perusahaan jalan tol dari sebelumnya perusahaan jasa konstruksi. Langkah itu ditempuh agar proyek pembangunan jalan tol dapat dilakukan dengan cepat tanpa memperhitungkan keuntungan yang masuk ke perusahaan.

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN agar Hutama Karya menjadi BUMN jalan tol 100% milik negara,” tutur dia. Bila kementerian terkait menyetujuinya, jalan tol Trans Sumatera dapat diselesaikan dalam waktu enam tahun dengan pengerjaannya dilakukan oleh Hutama Karya.

Dahlan menegaskan, Hutama Karya terpilih menjadi BUMN jalan tol karena perseroan memiliki kemampuan membangun jalan tol, ukuran perusahaan yang cukup besar, serta manajemen bersemangat tinggi untuk membangun jalan tol. Dengan adanya perusahaan jalan tol dengan kepemilikan 100% oleh pemerintah, maka pemerintah lebih leluasa untuk memberikan penugasan. (ean)